



Mojokerto
Full of Mojokerti Creativity

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO**

TAHUN ANGGARAN 2026



(0321) 391268



diskominfo.mojokertokab.go.id



diskominfo@mojokertokab.go.id



Jl. A. Yani no. 16 Kota Mojokerto, Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran wujud nyata dari rencana pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan Renstra OPD. Renja ini selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 guna meningkatkan kinerja OPD.

Kami menyadari bahwa Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ini mungkin masih perlu penyempurnaan, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai pembelajaran (*Learning Procces*) demi penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) dimasa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

Mojokerto, Agustus 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. Nugraha Budhi Sulistya, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690915 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SK RENCANA KERJA	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III	58
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika	66
3.3 Program dan Kegiatan	73
BAB IV	81
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V	83
PENUTUP	
5.1 Catatan Penting	83
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	83
5.3 Rencana Tindak Lanjut	84



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR: 188/1425/416-113/ 2025

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian penjabaran, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Universal Telekomunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029;
24. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
25. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2026**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Renja Dinas KOMINFO 2026 adalah acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas.
2. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut Renja Dinas KOMINFO adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pasal 2

1. Renja Dinas KOMINFO 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.
2. Renja Dinas KOMINFO 2026 menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2026.

Pasal 3

Renja Dinas KOMINFO 2026 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Segenap unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto berkewajiban melaksanakan Renja Dinas KOMINFO 2026 dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : Agustus 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. NUGRAHA BUDHI SULISTYA, M.Si.



1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan Daerah dalam sistem pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD yang ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, masing-masing Perangkat Daerah juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) guna integrasi dengan RPJMD. Oleh karena itu Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Mojokerto sehingga ada keselarasan antara visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Dokumen Renstra dan Renja dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran), dan setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kabupaten Mojokerto menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terangkum dalam APBD Kabupaten Mojokerto.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah memandang perlu untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja tahun 2026.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 merupakan rencana untuk tahun anggaran 2026 yang menggambarkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan dinas yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2025-2029. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas akan diakomodir sebagai kegiatan dalam rancangan Renja PD. Renja tahun 2026 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas.

Sedangkan Renstra Tahun 2025-2029 menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas yang disusun ke dalam rancangan Renja yang selaras dengan Renstra. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra berdasarkan pelaksanaan Renja tahun-

tahun sebelumnya dan fungsi PD.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rancangan renja PD dibahas pada Forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Kemudian renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 4 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 8 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Universal Telekomunikasi dan Informatika;
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Komunikasi dan Informatika;
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, TataCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 16 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
 - 17 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 18 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 20 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 - 22 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);
 - 23 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029);

- 24 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- 25 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah untuk menentukan arah dan langkah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto di tahun anggaran 2026 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yaitu memenuhi kebutuhan perangkat daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan untuk tahun 2026 yang memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di tahun anggaran 2026 dan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan Perangkat Daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 juga bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis dan sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk APBD Tahun 20246. Selain itu, dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 juga menjadi dokumen perencanaan di tahun pertama dari dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto di Tahun 2026 yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat Kabupaten Mojokerto;

- b. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2026 yang berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun 2026;
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah;
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah dengan capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- e. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- f. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- g. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang :

- 1. Renja Perangkat Daerah
- 2. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 3. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L dan Renja Provinsi

4. Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun lalu berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudahdisahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan, tantangan dan peluang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada kepalaperangkat daerah.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsinya perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan.

- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II **HASIL EVALUASI RENJA** **DINAS KOMUNIKASI DAN** **INFORMATIKA TAHUN LALU**

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 yang didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan tugas dan fungsi pada urusan wajib bukan pelayanan dasar yang meliputi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

Pelaksanaan kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target serta memenuhi output yang ditetapkan. Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan yang terdiri dari 15 sub kegiatan rutin (program penunjang urusan pemerintahan daerah) dan 18 sub kegiatan pembangunan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra)
1	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4	4,16	104%
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,5 (A)	85,20	98,49%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,80%	96,25	100,47%
		Indeks Profesionalitas ASN	92	84,24	91,56%
3	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	21	19	90,47%

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra tahun 2021 - 2026 maka ada beberapa indikator sasaran yang telah mencapai atau melampaui target akhir renstra yakni :

a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 4,16 yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra Diskominfo Tahun 2021- 2026; dan

- b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 96,25% yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra Diskominfo Tahun 2021-2026.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kabupaten Mojokerto, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.2
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,75	4,16	110,93%	Sangat Berhasil	Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE oleh KemenPAN-RB

Perhitungan Indeks sebesar 4,16 diperoleh dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Walaupun sudah melampaui target kinerja, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Kurang optimalnya tata kelola teknologi informasi;

- Kurang optimalnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
- Kurang optimalnya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- Rentannya keamanan informasi;
- Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- Belum optimalnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik; dan
- Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis : “Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tahun 2024 terealisasi sebesar 4,16 dan tingkat capaian sebesar 110,93% dengan predikat **Sangat Berhasil**. Hal ini menjadi faktor penunjang terhadap keberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Adapun rencana upaya perbaikan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

- Mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi untuk mewujudkan Smart City di Kabupaten Mojokerto;
- Membangun basis data yang terpadu dan up-to-date melalui Satu Data Palapa yang mendukung perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data (Data Driven Decision Making) di Kabupaten Mojokerto;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Tabel T-C 29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		100%	97,60%	100%	100,00%	100,00%		98,80%	98,80%
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	96,71%	95%	96,25%	105,12%	95,45%	96,14%	96,14%
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	85	89,81	90,00	84,24	93,60%	90	88,02	103,55%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,12	85,2	86	85,2	99,53%	86	85,47	101,60%
		Nilai RB Perangkat Daerah		83,25 (A)						
		Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	21 Inovasi	16 Inovasi	19 Inovasi	19 Inovasi	100,00%	20 Inovasi	19 Inovasi	90,48%
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan	35 Dokumen	9 Dokumen					9 Dokumen	25,71%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	75,00%
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan	30 dokumen/ laporan	13 dokumen/ laporan					13 dokumen/ laporan	43,33%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	21 laporan	75,00%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	12 bulan					12 bulan	20,00%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 orang/ 14 bulan	29 orang/ 14 bulan	29 orang/ 14 bulan	29 orang/ 14 bulan	85,29%	34 orang/ 14 bulan	92 orang/ 14 bulan	67,65%
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun sesuai Ketentuan	60 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0		0 bulan	0,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0 bulan	0 bulan	0 bulan		12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	360 pegawai	32 pegawai					32 pegawai	8,89%
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	0 paket	0 paket	0 paket		1 paket	1 paket	100,00%
2.16.01.2.05.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Junlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	324 pegawai	81 pegawai				81 pegawai	162 pegawai	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	97,68%					97,68%	97,68%
		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Terpenuhiya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 bulan	12 bulan					12 bulan	20,00%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket					1 paket	1 paket	25,00%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 bulan	12 bulan					12 bulan	20,00%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	27,27%
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Terpenuhiya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	60 bulan	12 bulan					12 bulan	20,00%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 paket	10 paket	10 paket	10 paket	100%	10 paket	30 paket	68,18%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	60 bulan	12 bulan					12 bulan	20,00%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 paket	75,00%
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Terpenuhiya Kebutuhan Bahan / Material	60 bulan	12 bulan					12 bulan	20,00%
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 paket	75,00%
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Terpenuhiya Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 bulan	12 bulan					12 bulan	20,00%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	15 laporan	75,00%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bulan	12 bulan					12 bulan	20,00%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 laporan	51 laporan	50 laporan	51 laporan	102%	60 laporan	162 laporan	70,43%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%					100%	100%
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	12 bulan					12 bulan	20,00%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	75,00%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bulan	12 bulan					12 bulan	20,00%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	75,00%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%					100%	100%
		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 kendaraan dinas	14 kendaraan dinas					14 kendaraan dinas	14,00%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 unit	14 unit	14 unit	14 unit	100%	14 unit	42 unit	75,00%
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60 bulan	12 bulan					12 bulan	20,00%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	9 unit	75,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Terpenuhinya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60 bulan	12 bulan					12 bulan	20,00%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	120 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	90 unit	75,00%
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	88%	98,74%					98,74%	112,20%
		IK : Indeks Keterbukaan Informasi Publik	73		71	79	112,01%	71	75	102,74%
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	88%	88%	100%	97,47%	97,47%		92,74%	105,38%
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%					100%	100%	100%
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfo	84,00%	88,98%					88,98%	105,93%
		Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas	600 berita	120 berita					120 berita	20,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	48 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	12 Dokumen	37 Dokumen	77,08%
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan STRAKOM	75%							
		Jumlah Konten Media Komunikasi Publik Daerah yang Terkelola	4.080 konten							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	25 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	13 Dokumen	25 Dokumen	100,00%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	80%	90%	0,00%	0,00%			90%	112,50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah media luar ruang	180 media luar ruang	36 media luar ruang	0 media luar ruang	0 media luar ruang				0,00%
		Jumlah Rubrik Klik Mojo yang dihasilkan	25 rubrik	0 rubrik	0 rubrik	0 rubrik				0,00%
		Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah	285 video	77 video	0 video	0 video			77 video	27,02%
		Jumlah Terpublikasinya Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah	2400 berita	839 berita	0 berita	0 berita			839 berita	34,96%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	158 Dokumen	14 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	24 Dokumen	53 Dokumen	33,54%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	100%					100%	100,00%
		Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID	70 informasi	71 informasi					71 informasi	101,43%
		Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang terselesaikan	800 pengaduan yg terselesaikan	50 pengaduan yg terselesaikan					50 pengaduan yg terselesaikan	6,25%
		Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT	3 kel. masy.milenial yg terlatih IT	13 kel. masy.milenial yg terlatih IT					13 kel. masy.milenial yg terlatih IT	433,33%
		Jumlah Layanan Call Center	33 layanan call center	13 layanan call center					13 layanan call center	39,39%
		Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi LAPOR SP4N yang Terselesaikan	150 pengaduan yg terselesaikan	82 pengaduan yg terselesaikan					82 pengaduan yg terselesaikan	54,67%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	168 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	14 Dokumen	22 Dokumen	13,10%
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi	390 hubungan media	94 hubungan media					94 hubungan media	24,10%
		Jumlah Layanan Hubungan Media	380 layanan	83 layanan	95 layanan	84 layanan	88,42%	95 layanan	262 layanan	68,95%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	70 KIM yang aktif	10 KIM yang aktif					10 KIM yang aktif	14,29%
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	1 Dokumen				3 Dokumen	4 Dokumen	33,33%
2.16.02.2.01.14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media						12 Dokumen		
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan						20 Permohonan		
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah						70 Rekomendasi		
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis						8 Media		
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Penyelenggaraan SPBE	85%	98,57%					98,57%	115,96%
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	3,9		3,7	3,8	102,70%	3,8	3,8	97,44%
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%					100%	100%
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	100%		100%	101,01%	101,01%	100%	100,51%	100,51%
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan subdomain (website PD)	73%							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Panatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50,00%
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%					100%	100%
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	398 unit	99 unit	100 unit	101 unit	101%	99 unit	299 unit	75,13%
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	84%	96,25%					96,25%	114,58%
		Tingkat kematangan aspek teknologi informasi pada domain tata kelola SPBE	3,8		3,7	3,8	102,70%	-	3,8	100,00%
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	2 Kebijakan	2 Kebijakan	0 Kebijakan	0 Kebijakan			2 Kebijakan	100,00%
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	100%					100%	100%
		Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online	100%	100%					100%	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	66,67%
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kesesuaian Penganggaran SPBE dengan Arsitektur SPBE	80%							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan dan menyimpan data di pusat data pemda	78%							
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	4 unit					2 unit	2 unit	50,00%
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi dalam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	100%	100%					100%	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	8 Dokumen	4 Dokumen				4 Dokumen	8 Dokumen	100,0%
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100%	100%					100%	100,0%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	4 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen	4 Dokumen	100,0%
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase PD yang mengintegrasikan datanya dalam dashboard command centre	100%	8,77%					8,77%	8,77%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	57	57 Perangkat Daerah				57 Perangkat Daerah		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	70%	74%					74%	106%
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	200 unit	0 unit	0 unit	0 unit		50 unit	50 unit	25,00%
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase PD yg memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah	70%	0%					0%	0%
		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	77 layanan	8 layanan	0 layanan	0 layanan		12 layanan	20 layanan	25,97%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	Persentase kegiatan yang terfasilitasi command center	92%	66%					66%	71,74%
		Persentase implementasi smart government	70%	100%					100%	142,86%
		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	16 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	6 Dokumen	37,50%
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	15 orang	10 orang	0 orang	0 orang			10 orang	66,67%
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	75,00%
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah rekomendasi/persetujuan	50 rekomendasi/persetujuan	15 rekomendasi/persetujuan					15 rekomendasi/persetujuan	30,00%
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	2 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan movev SPBE yang terlaksana	20 kegiatan	4 kegiatan					4 kegiatan	20%
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	6 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	2 Dokumen	33,33%
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda						4 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.03.2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas						46 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						46 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.03.2.02.28	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						1 Dokumen	0 Dokumen	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	80%	82,40%					82,40%	103,00%
		Indeks KAMI	400		300	648	216%	300	948	237,00%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	80%	100%	100%	100%	100%		100%	125%
		Persentase Layanan Elektronik yang Diamankan	90%		100%	100%	100%	80%	90,00%	100,00%
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan	10 kebijakan	2 kebijakan					2 kebijakan	20,00%
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan	2 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	10 Sistem Elektronik	3 Sistem Elektronik					3 Sistem Elektronik	30,00%
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	2 laporan	1 laporan				1 laporan	2 laporan	100,00%
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik	11 Sistem Elektronik	3 Sistem Elektronik					3 Sistem Elektronik	27,27%
		Indeks KAMI	sistem elektronik bernilai tinggi 20	sistem elektronik bernilai tinggi 15					sistem elektronik bernilai tinggi 15	75%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			status kesiapan cukup 500	status kesiapan cukup 123					status kesiapan cukup 123	25%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10 laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	1 laporan	6 laporan	60,00%
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	37%	56,53%					56,53%	152,78%
		Persentase OPD yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi	100%					100%	100%	100%
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase titik PHKS yang diamankan	37%	26,31%					26,31%	71,11%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	57 Perangkat Daerah	19 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah		57 Perangkat Daerah	76 Perangkat Daerah	133,33%
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto	80%	116,17%					116,17%	145,21%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,5		2,9	2,61	90,00%	3	2,805	80,14%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Mojokerto	80%	119,83%	100%	112,50%	112,50%		116,17%	145,21%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00%		100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	100,00%		100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai Standar Data Statistik Nasional (SDSN)	100,00%		68,42%	94,74%	138,47%	84,21%	89,48%	89,48%
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah					57 Perangkat Daerah	100,00%
		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan dalam portal Satu Data Kab.Mojokerto	3000 data	2190 data					2190 data	73,00%
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	76 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100,00%	18 Dokumen	54 Dokumen	71,05%
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Pengelola Data Statistik yang Terlatih	60 pengelola							
		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	346 orang	0 orang	0 orang	0 orang		108 orang	108 orang	31,21%
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	70%							
		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	116 Dokumen					29 Dokumen	29 Dokumen	25,00%
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	6 unit					2 unit	2 unit	33,33%
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Kebijakan Statistik Sektoral	2 kebijakan							
		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	29							
2.20.02.2.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan,						100%	41,30%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan								
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu						80%	0,00%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan target. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks SPBE	-	-	3,75	4,22	-	-	4,16		-	-	Pada tahun 2024-2025 IKU Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Indeks SPBE, namun per tahun 2026 indeks SPBE berubah menjadi Indeks Pemerintah Digital/Indeks Pemdi
2	Indeks Pemdi	-	-	-	-	2,00	2,10	-	-			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk dapat mencapai penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto masih keterkaitan dengan baik dengan tingkat provinsi atau kabupaten dan kota lain maupun tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sistem pemerintahan digital dan layanan publik berbasis TIK belum optimal	1. Infrastruktur TIK belum merata	1. Keterbatasan anggaran pembangunan TIK
		2. Aplikasi dan sistem digital belum terintegrasi	1. Pengembangan aplikasi dilakukan sektoral dan tidak berpedoman pada standar interoperabilitas
		3. Rendahnya kualitas layanan digital Pemerintah Daerah	1. Belum semua ASN terlatih dalam penggunaan aplikasi SPBE
			2. Kurangnya evaluasi dan user feedback
2	Belum optimalnya pengelolaan komunikasi publik yang transparan dan akuntabel	1. Belum adanya strategi komunikasi komunikasi publik yang terintegrasi	1. Belum semua Perangkat Daerah menyediakan akses terhadap informasi publik secara multi platform
			2. Rendahnya pemahaman dan kompetensi aparatur pengelola komunikasi publik dan komunitas dalam pengolahan konten publikasi

3	Tata kelola data daerah belum mendukung pengambilan keputusan berbasis data	1. Data Perangkat Daerah tidak terintegrasi dan masih tersebar	1. Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia
		2. Validitas dan akurasi data belum terjaga	1. Belum kuatnya mekanisme kontrol kualitas data pada Perangkat Daerah selaku produsen data
4	Keamanan siber dan perlindungan data daerah belum memadai	1. Sistem keamanan informasi belum dilaksanakan secara menyeluruh	1. Belum diterapkannya standar keamanan informasi (ISO 27001)
			2. Kurangnya SDM keamanan TI
			3. Kurangnya anggaran keamanan dan perlindungan siber
5	Rendahnya literasi digital masyarakat	1. Masyarakat kesulitan mengakses dan memanfaatkan layanan digital	1. Kurangnya pelatihan literasi digital berbasis komunitas
			2. Kesenjangan akses TIK di wilayah pedesaan

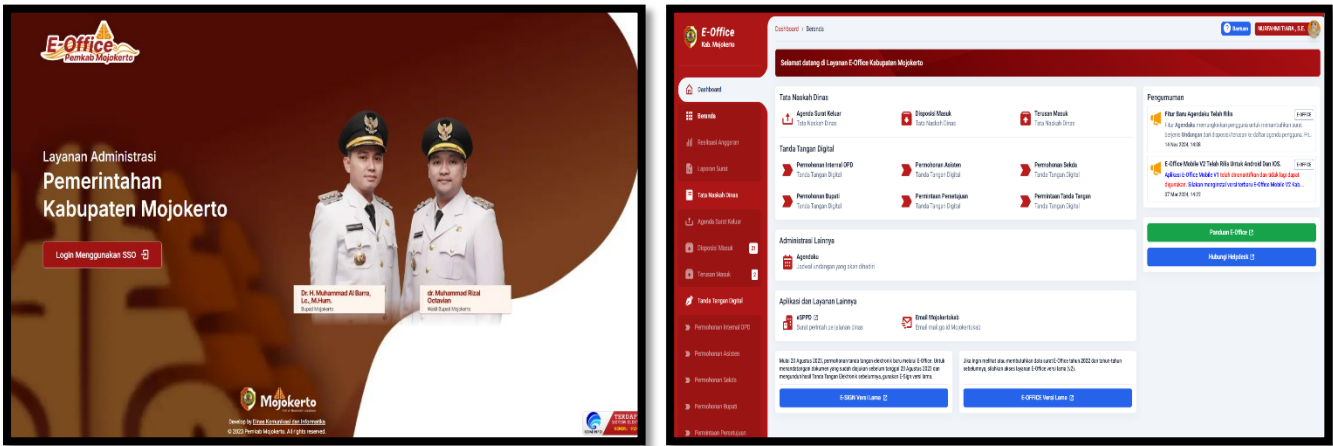
Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Letak geografis Kabupaten Mojokerto yang strategis di bagian tengah Jawa Timur mendukung pengembangan jaringan komunikasi berbasis fiber optik dan wireless	Infrastruktur TIK belum merata	Masih kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan di daerah	Kesenjangan akses digital (digital divide)	Percepatan transformasi digital	Pembangunan infrastruktur TIK daerah	Peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
2	Komitmen tinggi Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Aplikasi dan sistem digital belum terintegrasi		Sovereignty digital (kedaulatan digital) dan regulasi platform global		Digitalisasi pelayanan publik di daerah	Transformasi digital layanan publik dan administrasi pemerintahan
		Rendahnya kualitas layanan digital Pemerintah Daerah		-		Kapasitas SDM TIK di daerah	Peningkatan SDM TIK
3	Kabupaten Mojokerto sebagai daerah dengan beragam potensi wisata, UMKM, pertanian dan industri menghasilkan data besar (big	Data Perangkat Daerah tidak terintegrasi dan masih tersebar		AI, big data dan etika teknologi	Implementasi Satu Data Indonesia	Penerapan Satu Data Daerah	Optimalisasi penyelenggaraan Satu Data Palapa Kabupaten Mojokerto

	data) yang perlu dikelola dengan baik	Validitas dan akurasi data belum terjaga			Validitas dan kualitas data sektoral	Kualitas dan konsistensi data pembangunan	Validitas dan kualitas data statistik sektoral
4	Tingginya penggunaan media sosial di Kabupaten Mojokerto membuka ruang pengelolaan informasi publik secara cepat dan masif	Belum adanya strategi komunikasi publik yang terintegrasi		Kebebasan digital dan disinformasi global	Keterbukaan informasi publik	Kapasitas PPID dan keterbukaan informasi yang lemah	Keterbukaan informasi publik
5	Generasi muda sangat potensial sebagai agen transformasi digital lokal	Masyarakat kesulitan mengakses dan memanfaatkan layanan digital		Kesenjangan literasi digital antar negara	Rendahnya tingkat literasi digital nasional	Disparitas literasi digital antar wilayah	Peningkatan literasi digital masyarakat
6	Semakin banyaknya sistem pelayanan online di Kabupaten Mojokerto memunculkan kebutuhan akan sistem keamanan informasi yang kuat	Sistem keamanan informasi belum dilaksanakan secara menyeluruh		Meningkatnya ancaman siber global (cyber threats)	Pengamanan sistem pemerintah dan infrastruktur digital	Kelemahan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah	Peningkatan sistem keamanan informasi

Sebagai upaya dalam menghadapi dan mengatasi isu isu strategis dan permasalahan diatas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto telah menerapkan teknologi informasi pada sebagian besar pelayanan dan sebagian sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi melalui :

1. Layanan Tata Naskah Dinas melalui www.e-office.mojokertokab.go.id
Tata naskah dinas (surat dinas, disposisi dll) adalah urat nadi yang bertanggung jawab terhadap berjalannya sebuah sistem birokrasi. Kecepatan lalu lintas yang dijalankan melalui sistem tata naskah dinas inilah yang menentukan baik buruknya kualitas layanan birokrasi di pemerintahan. Aplikasi *e-office* memberikan kemudahan bagi perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan tata naskah dinas, seperti persuratan, tanda tangan dan pengiriman surat yang semuanya telah dilakukan secara online. Aplikasi *e-office* telah tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara melalui proses panjang dan tidak mudah. Melalui *e-office* tidak perlu lagi mengirimkan surat ke OPD dengan waktu lama, cukup 1 detik surat telah sampai ke OPD yang dituju. Tanda tangan dokumen, tanpa perlu menunggu pejabat terkait, cukup dengan membuat permohonan tanda tangan, secara otomatis akan sampai digenggam tangan pejabat yang dituju.



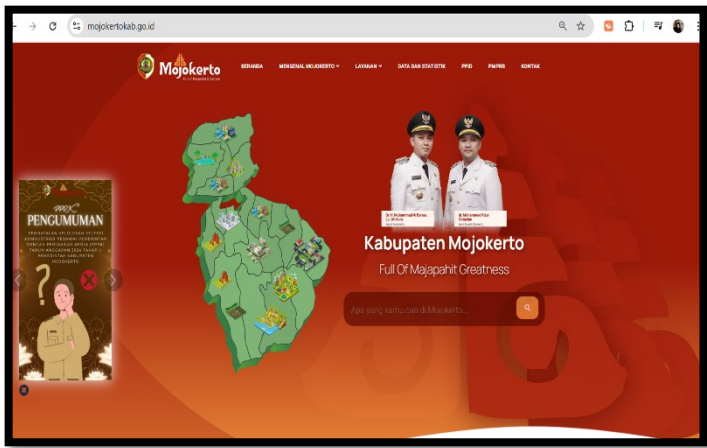
Gambar 2.1
Screenshot E-Office

2. Layanan Informasi Dan Dokumentasi

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan implementasi atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019

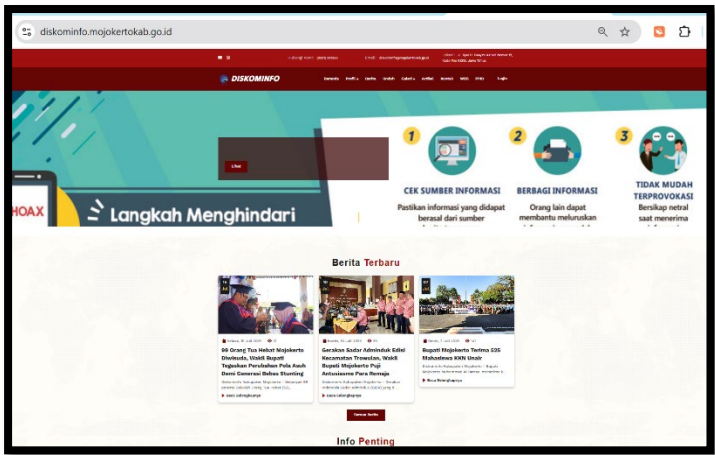
tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan transparansi informasi publik melalui pengelolaan website sebagai berikut :

- a. Portal pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui <https://mojokertokab.go.id/>. Masyarakat dapat mengetahui kegiatan pemerintah daerah dan dapat menggunakan website untuk mendapatkan layanan informasi dan layanan pengaduan lewat media online.



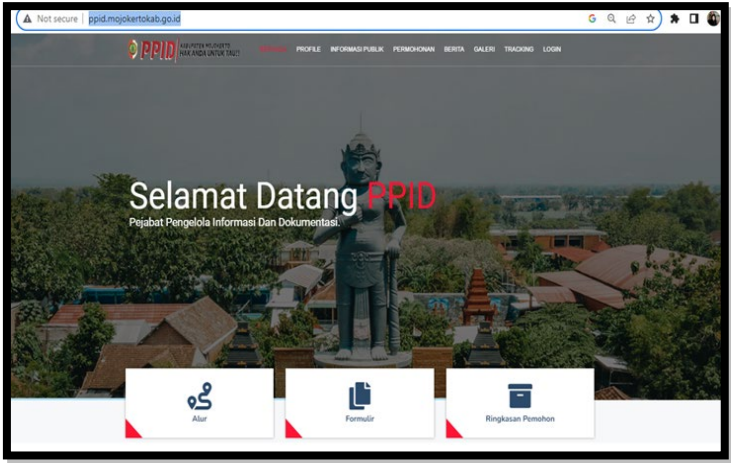
Gambar 2.2
Screenshot <https://mojokertokab.go.id/>

- b. Portal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto melalui <https://diskominfo.mojokertokab.go.id/>. Masyarakat bisa mendapatkan informasi segala kegiatan Dinas Kominfo dan juga dapat mengakses segala layanan online yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto melalui *official website* Dinas Kominfo.



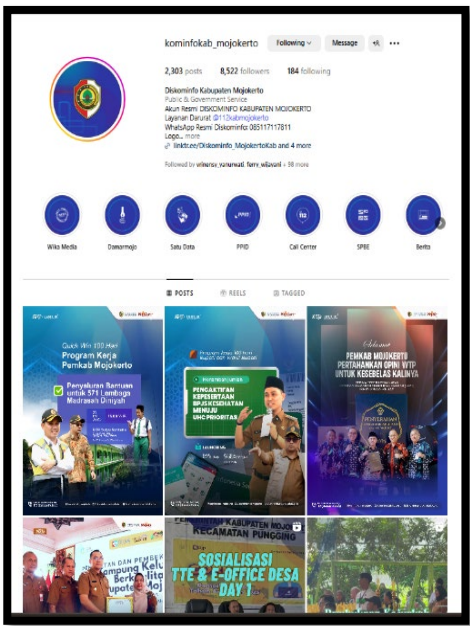
Gambar 2.3
Screenshot <https://diskominfo.mojokertokab.go.id/>

- c. Website PPID melalui <http://ppid.mojokertokab.go.id/>
- Untuk keterbukaan informasi publik secara online telah dirumuskan penguatan portal website PPID Kabupaten dan PPID OPD yang berisikan Daftar Informasi Publik (DIP) yang terbagi dalam informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat serta informasi yang dikecualikan.



Gambar 2.4
Screenshot <http://ppid.mojokertokab.go.id>

- d. Media sosial melalui http://instagram.com/kominfokab_mojokerto;
- Masyarakat bisa mendapatkan informasi segala kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto melalui official akun instagram Dinas Kominfo.



Gambar 2.5
Screenshot http://instagram.com/kominfokab_mojokerto

- e. Publikasi melalui wikafm.mojokertokab.go.id; [youtube.com wika](https://youtube.com/wika) TV Dinas Komunikasi dan Informatika selaku penanggung jawab atas pengelolaan media komunikasi Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan WIKA FM sebagai radio dan sarana media interaktif antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui inetraktif dalam program-program siaran radio/*podcast*. Pelayanan yang tersebut diatas merupakan pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial).



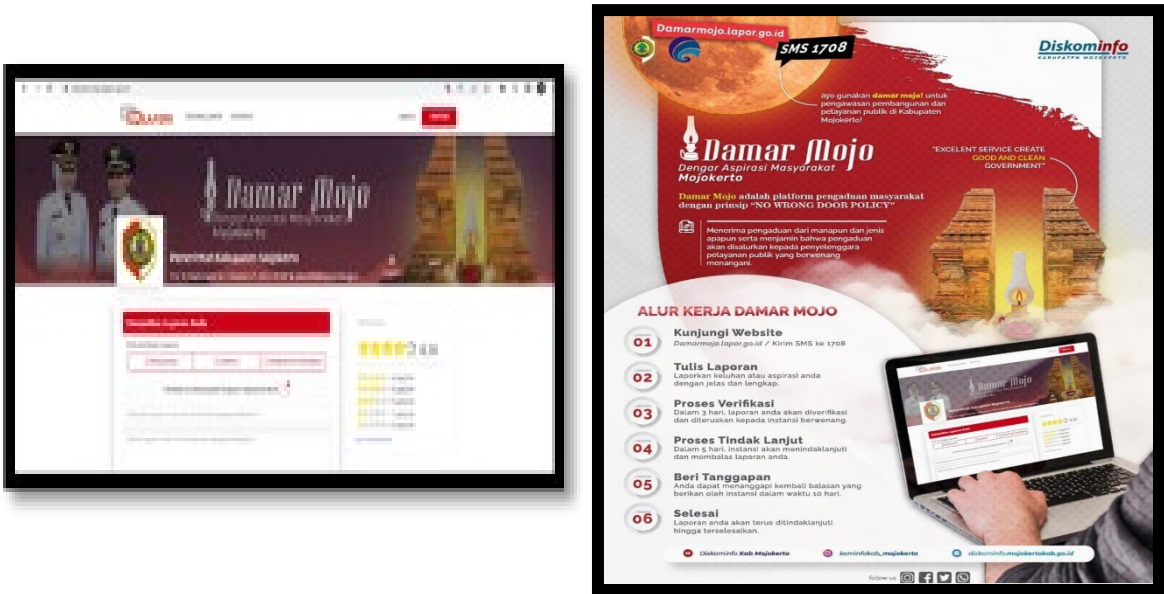
Gambar 2.6
Dokumentasi kegiatan podcast WIKA

Pelayanan yang tersebut diatas merupakan pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media. Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial)

3. Layanan Aspirasi Dan Pengaduan melalui damarmojo.lapor.go.id dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional www.lapor.go.id;

Dengar Aspirasi Masyarakat Mojokerto adalah platform yang hadir untuk menanggapi aspirasi, pertanyaan dan pengaduan masyarakat. Damar Mojo merupakan media sosial masyarakat dan pemerintah dengan prinsip mudah dan terpadu. Mudah karena bisa diakses melalui telepon seluler, internet dan aplikasi mobile. Dalam penggunaan situs damar mojo anda dapat bergabung dengan menggunakan akun facebook, twitter atau mengisi formulir sederhana yang tersedia. Setelah aktivasi akun, pengguna dapat login memberikan laporan berupa aspirasi atau pengaduan. Pastikan laporan anda dilaporkan secara kronologis, jelas dan lengkap juga disertai kategori laporan.

Kirimkan laporan tersebut dan laporan anda akan masuk dalam antrian verifikasi laporan untuk dikelola melalui layanan aspirasi masyarakat (LAPOR) sebagai portal terpadu. Terpadu karena lapor terhubung dengan instansi pemerintah, kementerian dan lembaga. Selain itu Damar mojo digunakan oleh pemda sebagai sistem pengelolaan laporan masyarakat dan satuan kerja perangkat. Sehingga laporan anda bisa terhubung dengan instansi pemerintah terkait. Laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu untuk kemudian didisposisikan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut. Percakapan antara masyarakat dan pemerintah dapat disertai data dukung untuk memperjelas substansi laporan. Damar mojo telah terhubung dengan 48 satuan kerja perangkat daerah, 2 lembaga non pemerintah instansi dan terhubung dengan bupati Mojokerto.



Gambar 2.7
Screenshot <https://damarmojolapor.go.id/>

4. Layanan Panggilan Darurat Surya Mojo Siaga (Call Center 112)

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi:

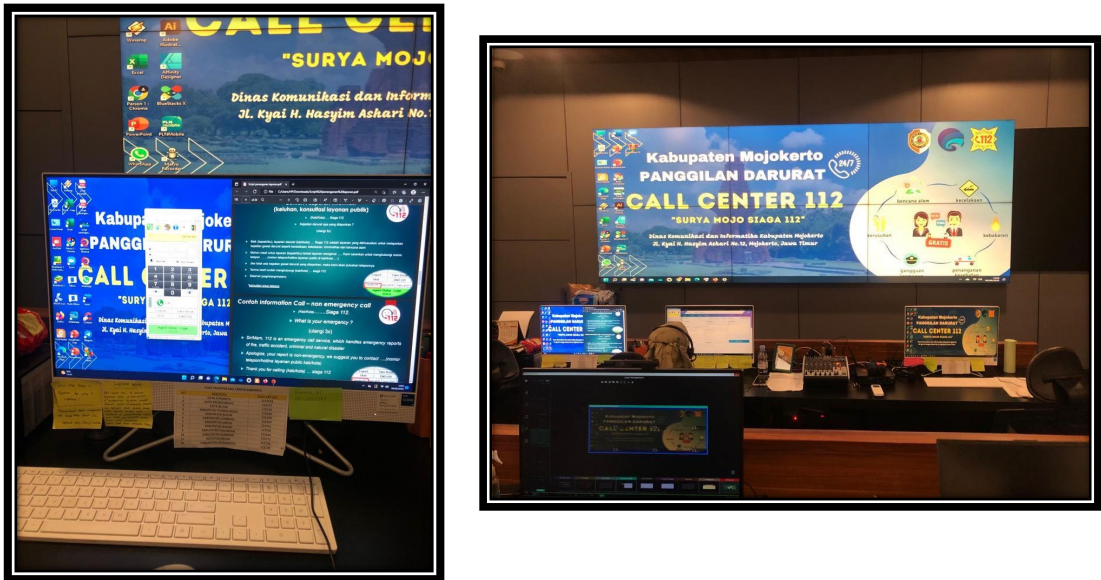
- a. kebakaran;
- b. kerusakan;
- c. kecelakaan;
- d. bencana alam;
- e. penanganan masalah kesehatan;
- f. gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- g. keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah



dan/atau Pemda.

Masyarakat Kabupaten Mojokerto dapat menghubungi layanan call center 112 apabila mendapatkan keadaan darurat sebagaimana tersebut diatas yang akan terhubung dengan instansi terkait.

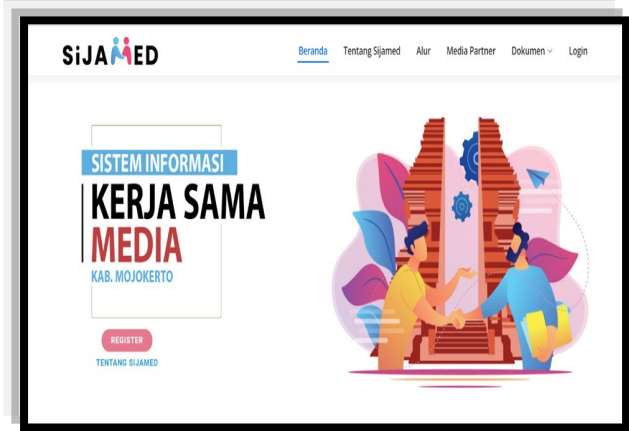
Layanan Surya Mojo Siaga 112 ini aktif selama 24 Jam dalam melayani semua masyarakat Kabupaten Mojokerto. Selain itu, layanan ini juga bebas pulsa alias gratis.



Gambar 2.8
Screenshot Call Center 112

5. Layanan Hubungan Media

SIJAMED (Sistem Informasi Kerjasama Media) merupakan inovasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto, dalam rangka menjalankan tugas kerjasama media Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan media partner, secara transparan, efektif dan efisien.



Gambar 2.9
Screenshot <https://sijamed.mojokertokab.go.id/>

6. Layanan Internet melalui pembangunan *fiber optic*, *command center* dan *digital center*



Gambar 2.10
Command Center dan Control Room

7. Satu Data Palapa Kab. Mojokerto

Portel Satu Data Palapa merupakan media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel dalam lingkup Kabupaten Mojokerto.



Gambar 2.11
Screenshot <https://data.mojokertokab.go.id/>

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi oleh faktor Lingkungan strategis. Adapun lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan (*strenghts*) (S) dan kelemahan (*weakness*) (W) dan lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunity*) (O) dan tantangan (*threats*) (T).

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan (*key succes factors*) yang merupakan faktor penentu yang dipandang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan sasarandengan menerapkan metode analisis SWOT (*strenghts, weaknesses, opportunities dan threats*). Implementasi metode ini akan membantu Perangkat Daerah untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila Perangkat Daerah mengembangkan kelemahannya karena ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

1. Kekuatan (Strength)

- a. Tersedianya anggaran yang cukup untuk merealisasikan program kegiatan Dinas Komunikasi dan informatika;
- b. Adanya regulasi Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- c. Tersedianya sarana prasarana yang memadai;

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola dan pengguna TIK;
- b. Belum terintegrasinya Sistem Informasi, Database, Regulasi dan Tata Kelola TIK terutama dalam tataran petunjuk teknis pengelolaan TIK di tingkat Perangkat Daerah;
- c. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dengan mengoptimalkan pengembangan aplikasi TIK;

B. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

1. Peluang (Opportunities)

- a. Dukungan Pemkab Mojokerto dalam upaya transparansi, percepatan dan peningkatan layanan publik;
- b. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;
- c. Kebutuhan pengembangan muatan *e-Government/ SPBE*;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan informasi terhadap layanan berbasis IT (adanya *Smart City*);

2. Ancaman (Threats)

- a. Globalisasi informasi dan pesatnya perkembangan TIK yang berdampak pada keterbukaan informasi publik sehingga kemungkinan kehilangan/kerusakan data akibat *system error/crash* dan kejahatan dunia maya;
- b. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata dan terdapatnya pengelolaan media informasi yang belum terjangkau sehingga masih ada kesenjangan informasi di masyarakat;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, merupakan pedoman untuk penyusunan Renja PD. Renja PD merupakan kebijakan *Top Down Planning* yaitu kebijakan yang harus mengikuti arah kebijakan dari pusat dan juga harus melaksanakan *Up Down Planning* yaitu harus mengadopsi usulan dari masyarakat sehingga PD nantinya menyelaraskan antara usulan dari bawah dan menyelaraskannya dengan kebijakan dari atas.

Review Terhadap Rancangan Awal Mojokerto akan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel T-C 31
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
 Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo			7.185.570.880	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo			5.660.616.900	
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,4%				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,4%		
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	85,5				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	85,5		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,1 (A)				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,1 (A)		
			Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	21				Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	21		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan	100%	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan	100%	12.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.000.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	6.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%	5.209.070.880	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%	5.057.382.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.209.070.880	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.057.382.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%	334.000.000						
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	59.000.000						
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 orang	275.000.000						
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	798.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	96.600.000	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	40.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	500.000.000						
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	17.600.000	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
10	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	8.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4.000.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	120.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	30.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	100%	140.000.000						
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	140.000.000						
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan	100%	192.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan	100%	142.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	492.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	352.634.900	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	85.000.000	
17	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	246.034.900	
18	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	42.500.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	21.600.000	
II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Mjk	IK : Indeks Keterbukaan Informasi Publik	81	4.542.000.000	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Mjk	IK : Indeks Keterbukaan Informasi Publik	81	4.645.814.952	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mjk	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	4.542.000.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mjk	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	4.645.814.952	
19	Relasi Media		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	3.000.000.000	Relasi Media		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	2.700.000.000	
20	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	36 Komunitas	50.000.000						
21	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20 Permohonan	495.000.000	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20 Permohonan	489.085.000	
22	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	70 Rekomendasi	397.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	70 Rekomendasi	384.540.188	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
23	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	8 Media	600.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	8 Media	1.072.189.764	
III	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Mjk	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Digital	2,00 (nilai)	15.025.000.000	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Mjk	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Digital	2,00 (nilai)	8.047.986.640	
9	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mjk	Persentase Pengelolaan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten yang Telah Ditetapkan	100%	75.000.000						
24	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2 Dokumen	75.000.000						
10	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	26,00%	14.950.000.000	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	26,00%	8.047.986.640	
25	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	8 Dokumen	250.000.000						
26	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	46 Perangkat Daerah	12.000.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	46 Perangkat Daerah	6.747.986.640	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
27	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	3 Dokumen	300.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	3 Dokumen	100.000.000	
28	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	20 Aplikasi	1.200.000.000	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	20 Aplikasi	900.000.000	
29	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	3 Laporan	200.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	3 Laporan	100.000.000	
30	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	9 Dokumen	500.000.000	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	9 Dokumen	100.000.000	
31	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	4 Dokumen	500.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	4 Dokumen	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Mjk	Indeks KAMI	649	700.000.000	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Mjk	Indeks KAMI	649	200.000.000	
11	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mjk	Persentase Layanan Elektronik yang Diamankan	85%	700.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mjk	Persentase Layanan Elektronik yang Diamankan	85%	200.000.000	
32	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	300.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	50.000.000	
33	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2 Dokumen	400.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2 Dokumen	150.000.000	
V	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Mjk	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,8	1.000.000.000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Mjk	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,8	275.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
12	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mjk	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	100%	1.000.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mjk	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	100%	275.000.000	
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	100%				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	100%		
			Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai Standar Data Statistik Nasional (SDSN)	86,00%				Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai Standar Data Statistik Nasional (SDSN)	86,00%		
34	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional		Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	52,17%	300.000.000	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional		Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	52,17%	150.000.000	
35	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	15,21%	150.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
36	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	200.000.000	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	75.000.000	
37	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	100.000.000						
38	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	52,17%	100.000.000						
39	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	50.000.000	
					28.452.570.880						18.829.418.492

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diskominfo Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan, salah satunya forum konsultasi publik. Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. Melalui forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitik beratkan pada aspek teknokratis. Oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi / perguruan tinggi, LSM dan OPD di Provinsi. Dari hasil forum konsultasi tersebut, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan lebih terkait pada pelayanan publik di sektor-sektor pembangunan.

Tabel 2.5.1 Kamus Usulan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

KAMUS USULAN ASPIRASI MASYARAKAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2026

NO	ISU/BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		USULAN PERMASALAHAN	SATUAN	PERSYARATAN USULAN	JENIS USULAN		JENIS BELANJA			OPD PENANGGUNG JAWAB
							ASPIRASI	POKIR	PROGRAM	HIBAH	BANSOS	
1	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Pemasangan Wifi di area publik yang dikelola oleh Pemda (Objek Wisata, RTH, GOR dll)	Unit	1. Memberikan surat permohonan/proposal 2. Tersedia jaringan listrik 3. Foto/Dokumentasi; Titik Koordinat	√		√			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah									
2	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Pelatihan TIK bagi masyarakat	Kegiatan	1. Memberikan surat permohonan/proposal 2. Mengajukan daftar peserta (minimal peserta 20 orang)	√		√			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota									
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah									

3	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Sosialisasi layanan pengaduan masyarakat	Kegiatan	1. Memberikan surat permohonan/proposal 2. Merupakan bentuk Lembaga Desa 3. Minimal jumlah peserta 35 orang 3. Segala biaya ditanggung oleh pelaksana kegiatan/pemohon (desa)	√		√			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Pelayanan Informasi Publik									
4	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Promosi potensi desa melalui media komunikasi Pemda (Podcast WIKI)	Kegiatan	1. Membuat surat permohonan disertai bukti pendukung potensi desa yang akan dipublikasikan dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Desa	√		√			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik									



3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

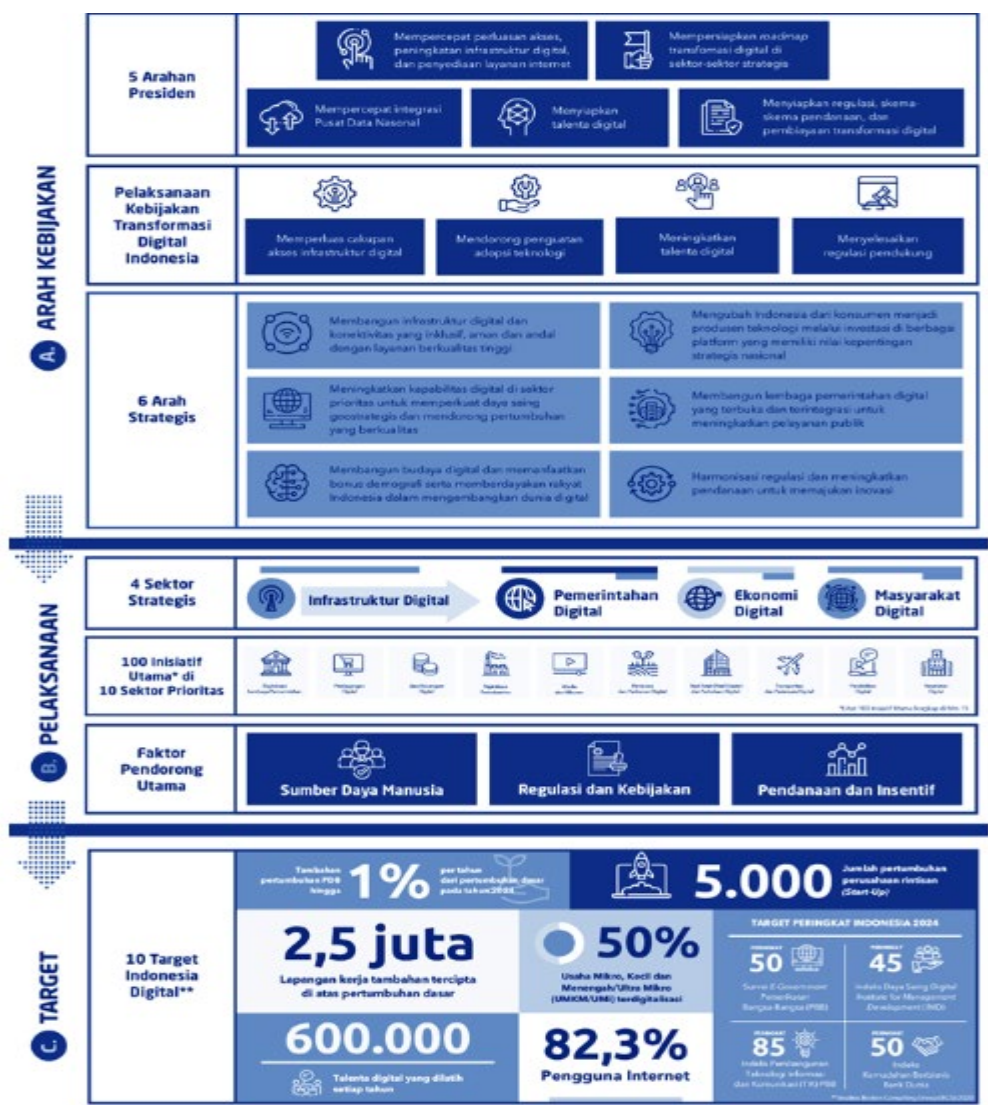
Transisi ekonomi Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor sekaligus membuka kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan ekonomi bernilai tambah yang terus meningkat dan didorong oleh sektor manufaktur dan jasa. Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 dan menjadi pemimpin di panggung internasional. Oleh sebab itu, transformasi digital akan menjadi katalis yang penting dalam perjalanan ini yang akan mendorong Indonesia berubah dari negara konsumen menjadi negara produsen.

Percepatan transformasi digital dilaksanakan melalui 5 (lima) langkah, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital ini menjadi pondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital.

Indonesia digital menetapkan 6 (enam) arahan strategis untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi kelas dunia, SDM yang terampil dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam arahan strategis dimaksud adalah :

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi.

2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud dan identitas digital nasional.
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sector prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
4. Membangun Lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital.
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.



Gambar 3.1 Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional

Dalam arahan terkait kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah di bidang ekonomi melalui percepatan transformasi digital pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bahwa digitalisasi adalah suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Pemerintahan di era digital membutuhkan *Digital Public Infrastructure* (DPI) sebagai pondasi untuk membangun dan mengelola platform strategis. DPI merupakan model arsitektur pemerintah digital yang saat ini diadopsi dunia dengan focus pada system dasar sebagai basis pembangunan layanan. DPI meliputi Digital ID, Data Exchange Platform, serta Digital Payment.

Saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki Government Technology (GovTech) dengan nama INA Digital yang telah merilis secara terbatas tiga produk digital meliputi layanan identitas digital terpadu (INApas), portal nasional pelayanan public (INaku) dan portal nasional administrasi pemerintahan (INAgov). DPI dan *use case* prioritas perlu untuk terus dikembangkan sebagai kunci percepatan dan pondasi digital kesuksesan program prioritas Presiden.

Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan untuk mendukung pelaksanaan program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selanjutnya melalui rencana strategis lima tahunan yang disusun ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto berupaya merancang program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan internet dan pengembangan TIK.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya, akan dilakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan para pemangku kepentingan.

Fungsi dan kedudukan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto periode 2025-2029 adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025 – 2029 sesuai dengan visi Kepala Daerah terpilih adalah :

**TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH
MAJU, ADIL DAN MAKMUR**

Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan Makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai **“Catur Abhipraya Mubarak”**. Identitas kepemimpinan ini merupakan cerminan dari 4 (empat) misi utama yang menjadi landasan pembangunan Kabupaten Mojokerto pada periode 2025 – 2029. Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Mojokerto nomor 90 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto, Diskominfo mendukung **Misi ke 1, yaitu Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**. Dalam mewujudkan Misi ke 1 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto ikut bertanggungjawab meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital yang memastikan perluasan akses dan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu tata kelola pemerintahan yang baik juga akan diperkuat dengan menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan publik, sekaligus mendorong

peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto secara aktif memiliki peran untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi, mendorong penggunaan tanda tangan digital, pengendalian konten, dan upaya perlindungan data pribadi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto juga memiliki program-program yang ditujukan langsung ke masyarakat untuk siap menghadapi era digital, contohnya program Literasi Digital untuk meningkatkan awareness masyarakat dalam menggunakan internet dan perangkat TIK.

Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas pokok yaitu sebagai unsur SKPD, Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Pembangunan Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat nasional.

Tabel 3.1
Hasil Telaah Kebijakan dan Program Nasional

<i>Highlight</i> Intervensi isu TIK	ISU STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	ISU STRATEGIS INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK
1. Penuntasan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur TIK 2. Penguatan SDM Digital 3. Digitalisasi sektor ekonomi dan layanan publik, termasuk diantaranya pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, industri, dst 4. Penguatan keamanan siber 5. Riset dalam rangka penguasaan teknologi 6. Pengembangan <i>superplatform</i> digital	Infrastruktur Transformasi Digital 1. Terdapat desa/kelurahan <i>blankspot</i> 2. Keandalan kualitas jaringan telekomunikasi melalui kabel serat optik belum merata 3. Pengelolaan, integrasi dan interkoneksi Pusat Data Nasional (PDN) 4. <i>Coverage</i> penyiaran digital	1. Kepercayaan dan partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan 2. Masih maraknya disinformasi, misinformasi, konten negatif dan umpan balik 3. Penyebaran informasi publik masih belum merata dan berkeadilan, khususnya di wilayah terluar, terdepan, tertinggal dan transmigrasi 4. Masih kurangnya pemahaman dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di badan publik dan masyarakat 5. Perlunya peningkatan talenta digital untuk mendukung transformasi digital sebagai strategi kunci transformasi ekonomi 6. Belum optimalnya kebebasan pers dan kualitas konten penyiaran dan pers
	Digitalisasi Sektor Strategis 1. Terdapat layanan pendidikan dan kesehatan belum berinternet 2. Penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI) 3. Adopsi digital bagi para pelaku UMKM masih rendah (<i>e-commerce</i>) 4. Inovasi dan pengembangan keuangan digital (<i>FinTech</i>) 5. Pengelolaan destinasi wisata, pertanian, perikanan, logistik dan industri berbasis teknologi	
	Aspek Pendukung dan Akselerator Transformasi Digital 1. Keamanan siber nasional 2. Perlindungan data pribadi dan privasi 3. Literasi digital masyarakat belum merata 4. Penyediaan SDM dan talenta digital berkualitas untuk menguasai dan menerapkan adopsi teknologi 5. Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence (AI)</i>, <i>Big Data Analytics</i>, <i>Blockchain</i>	
		Arah Kebijakan Isu IKP 1. Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik 2. Pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri

Tabel 3.2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik													
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif.	Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Pemerintahan	Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi: Membuat informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan kinerja publik lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan kinerja dan keuangan secara terbuka, portal transparansi, atau publikasi data terbuka (open data)	Indeks Pemerintah Digital	-	-	2,0	2,10	2,20	2,30	2,40	2,40	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029
Prioritas Arah Kebijakan

Tahun	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
2027	Transformasi Ekonomi	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1. Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet
2028	Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola	1. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat

Program Prioritas

Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung atas pelaksanaan misi dan program politis serta program nomenklatur sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik

Program Prioritas :

1. Peningkatan layanan terpadu satu pintu, pengembangan aplikasi layanan publik;
2. Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik.
3. Pengembangan Infrastruktur Digital;

Program Unggulan :

1. PENDOPO (Pembangunan Desa berbasis Produksi)
2. WAJIB DEDISER (Desa Digital Service)
3. Digitalisasi Pemerintahan (e-Government)
4. MPP (Mall Pelayanan Publik) Digital

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Di tahun 2021 Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2018 dilakukan pencabutan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Sebagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi dalam melaksanakan sasaran dan target kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2026 berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.

Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun 2026 adalah:

Tujuan :

“Meningkatnya kualitas digitalisasi pemerintahan.”

Sasaran :

“Meningkatnya Transformasi Digital Pemerintah Daerah”

Indikator Sasaran :

“Indeks Pemerintah Digital”

Tabel 3.1.5
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
MOJOKERTO
TAHUN 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -
1	Meningkatnya kualitas digitalisasi pemerintahan	Meningkatnya Transformasi Digital Pemerintah Daerah	Indeks Pemerintah Digital	2,00

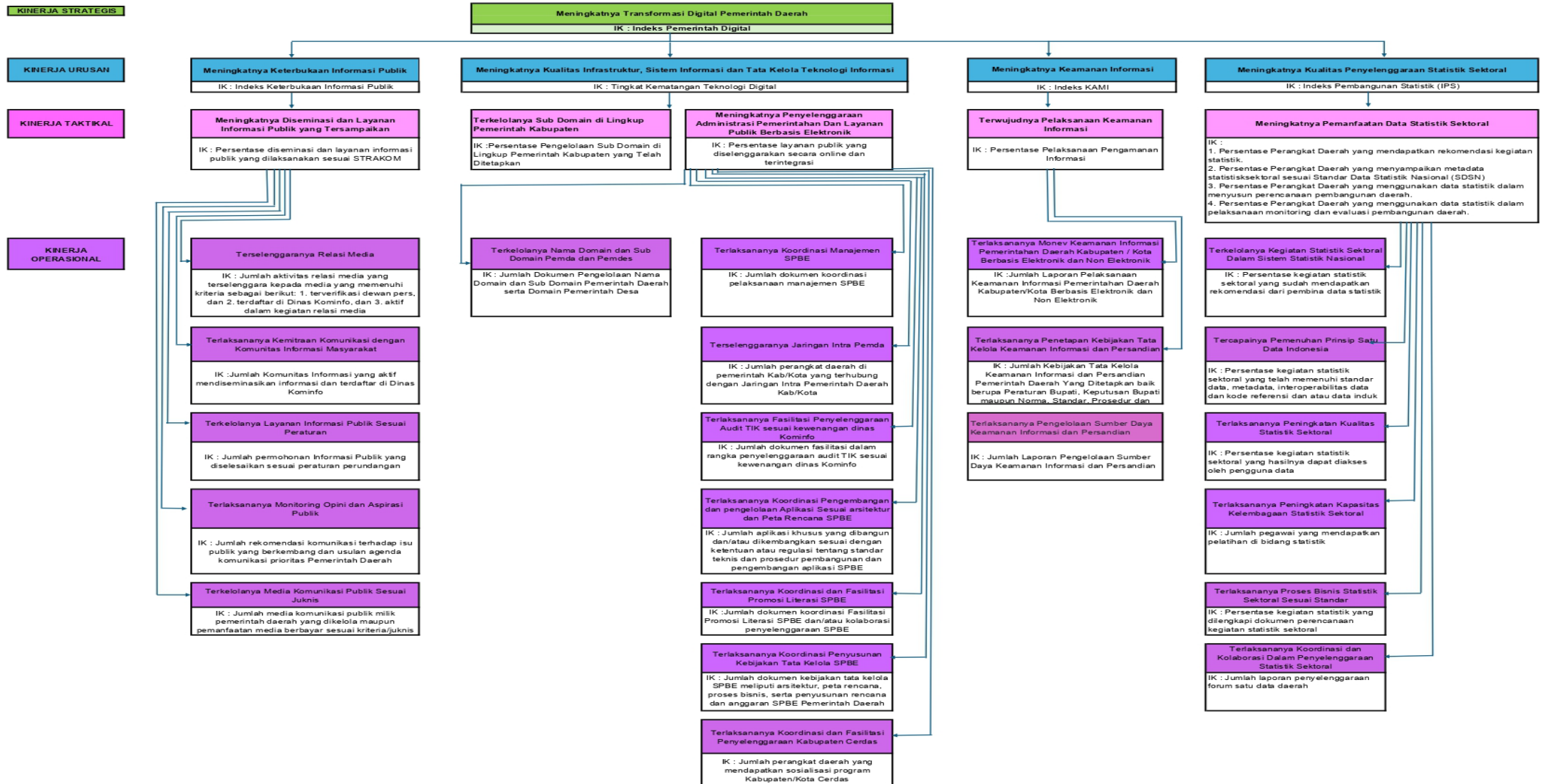
Tabel 3.1.6

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Transformasi Digital Pemerintah Daerah	Indeks Pemerintah Digital	2,00

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,1 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,4 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,5 (Tinggi)
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	21 Inovasi

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA PD				BESLON III/ IF. AHLI MADYA				BESLON III/ IF. AHLI MUDA				PELAKSANA/ IF AHLI PERTAMA									
Tujuan Pokok	Indikator Tujuan Pokok	Sasaran/Strategis Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Sasaran Program (Pokok)	Program SIPD	Indikator Program (Pokok)	Indikator Program SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Pokok	Indikator Sub Neg SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran	Indikator Rencana Sub Kegiatan	Penanggung Jawab					
Meningkatnya kualitas digitalisasi pemerintahan	Indeks Pemerintah Digital	Meningkatnya Transformasi Digital Pemerintah Daerah	Indeks Pemerintah Digital	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Meningkatnya Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai STRAKOM	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai STRAKOM	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai STRAKOM	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Terselenggaranya Relasi Media	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media yang terselenggara kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di www.pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Jumlah aktivitas relasi media yang terselenggara kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di www.pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Tersedianya Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Relasi Media	Jumlah Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Relasi Media	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/ Pelaksana
									Terkelolanya Mitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Mitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendokumentasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendokumentasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Tersedianya Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Mitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Mitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/ Pelaksana					
									Terkelolanya Layanan Informasi Publik Sesuai Peraturan	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Tersedianya Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/ Pelaksana					
									Terkelolanya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Tersedianya Data Pendukung Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Data Pendukung Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/ Pelaksana					
									Terkelolanya Media Komunikasi Publik Sesuai Jurnal	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/jurnal	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/jurnal	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Tersedianya Dokumen Pendukung Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Pendukung Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/ Pelaksana					
				Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Teknologi Digital	Kepala Bidang Informatika	Terkelolanya Sub-Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten	Pengelolaan Nama-Domain yang Telah Didaftarkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub-Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sub-Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten yang Telah Didaftarkan	Persentase Pengelolaan Sub-Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten yang Telah Didaftarkan	Kepala Bidang Informatika	Terkelolanya Nama-Domain dan Sub-Domain Pemda dan Penda	Pengelolaan Nama-Domain dan Sub-Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama-Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama-Domain dan Sub-Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama-Domain dan Sub-Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Pranata Komputer Ahli Muda	Tersedianya Data Pendukung Dokumen Pengelolaan Nama-Domain dan Sub-Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Jumlah Data Pendukung Dokumen Pengelolaan Nama-Domain dan Sub-Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Pranata Komputer Ahli Pertama
									Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Dan Layanan Publik Berbasis Sistem	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi pada Domain Tata Kelola SPBE	Kepala Bidang Informatika	Terkelolanya Koordinasi Pelaksanaan SPBE	Koordinasi Pelaksanaan SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Pranata Komputer Ahli Muda	Tersedianya Data Pendukung Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Data Pendukung Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Pranata Komputer Ahli Pertama
									Terselenggaranya Jaringan Intra Pemda	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pranata Komputer Ahli Muda	Tersedianya Data Pendukung Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Data Pendukung Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pranata Komputer Ahli Pertama					
									Terkelolanya Fasilitas Penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Pranata Komputer Ahli Muda	Tersedianya Data Pendukung Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Data Pendukung Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Pranata Komputer Ahli Pertama					
									Terkelolanya Koordinasi Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sesuai arsitektur dan Petarencana SPBE	Koordinasi pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan petarencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Pranata Komputer Ahli Muda	Tersedianya Dokumen Pendukung pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan petarencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan	Jumlah Dokumen Pendukung pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan petarencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan	Pranata Komputer Ahli Pertama					

[illegible]

KEPALA PD				BESLON III/ JF. AHLI MADYA				BESLON III/ JF. AHLI MADYA				BESLON IV/ JF. AHLI MUDA				PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA					
														Terlaksananya Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Statistisi Ahli Muda	Tersedianya Dokumen Pendukung Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Pendukung Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	JF Statistisi Ahli Pertama / Pelaksana
														Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Statistisi Ahli Muda	Tersedianya Dokumen Pendukung Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Pendukung Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	JF Statistisi Ahli Pertama / Pelaksana
														Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Statistisi Ahli Muda	Tersedianya Dokumen Pendukung Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Pendukung Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	JF Statistisi Ahli Pertama / Pelaksana
														Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Statistisi Ahli Muda	Tersedianya Data Pendukung laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Jumlah Data Pendukung laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	JF Statistisi Ahli Pertama / Pelaksana

3.3 Program Dan Kegiatan

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah *stakeholders* dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diharapkan terjadi kejelasan, ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sehingga dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto telah dilakukan pemetaan/*mapping* berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 pada tahapan rancangan awal. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun 2026 yaitu sejumlah 5 program, 9 kegiatan dan 28 sub kegiatan sesuai

dengan sasaran rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.7
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6.	Penyediaan Bahan / Material
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
13.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
6.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
14.	Relasi Media
15.	Pelayanan Informasi Publik
16.	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

17.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
III	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
7.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
18.	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
19.	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
20.	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
21.	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
22.	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
23.	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
8.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
24.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
25.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
V	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
9.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
26.	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
27.	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
28.	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Komunikasi dan informatika sebagaimana tersaji dalam tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Disko minfo		5.660.616.900	DAU		7.335.064.371
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		96,4%			96,5%	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		85,5			86	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86,1 (A)			86,2 (A)	
		Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan		21			22	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan	Disko minfo	100%	12.000.000	DAU	100%	30.000.000
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	6.000.000		6 Dokumen	15.000.000
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Laporan	6.000.000		7 Laporan	15.000.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	Disko minfo	100%	5.057.382.000	DAU	100%	5.470.064.371
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		38 Orang/bulan	5.057.382.000		38 Orang/bulan	5.470.064.371
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan					100%	335.000.000
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					2 paket	60.000.000
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Junlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					85 orang	275.000.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Disko minfo	100%	96.600.000	DAU	100%	808.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 paket	40.000.000
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 paket	500.000.000
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	17.600.000		5 Paket	50.000.000
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	20.000.000		1 Paket	30.000.000
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	25.000.000		1 Paket	60.000.000
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan	4.000.000		4 Laporan	8.000.000
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		75 Laporan	30.000.000		75 Laporan	120.000.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan					100%	150.000.000
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 unit	150.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan	Disko minfo	100%	142.000.000	DAU	100%	192.000.000
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	100.000.000		12 Laporan	150.000.000
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	42.000.000		12 Laporan	42.000.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Disko minfo	100%	352.634.900	DAU	100%	350.000.000
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		14 Unit	85.000.000		14 Unit	150.000.000
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	246.034.900		3 Unit	150.000.000
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		30 Unit	21.600.000		40 Unit	50.000.000
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	IK : Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kab. Mjk	81	4.645.814.952	DAU	82	5.575.000.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Mjk	100%	4.645.814.952	DAU	100%	5.575.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		12 Laporan	2.700.000.000		12 Laporan	4.000.000.000
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo					36 Komunitas	75.000.000
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		20 Permohonan	489.085.000		20 Permohonan	500.000.000
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		70 Rekomendasi	384.540.188		75 Rekomendasi	400.000.000
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		8 Media	1.072.189.764		8 Media	600.000.000
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Digital	Kab. Mjk	2,00 (nilai)	8.047.986.640	DAU	2,10 (nilai)	16.275.000.000
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten yang Telah Ditetapkan	Kab. Mjk			DAU	100%	75.000.000
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa					2 Dokumen	75.000.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		26,00%	8.047.986.640	DAU	28,00%	16.200.000.000
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE					8 Dokumen	400.000.000
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		46 Perangkat Daerah	6.747.986.640		46 Perangkat Daerah	13.000.000.000
2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		3 Dokumen	100.000.000		3 Dokumen	300.000.000
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE		20 Aplikasi	900.000.000		20 Aplikasi	1.200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		3 Laporan	100.000.000		3 Laporan	300.000.000
2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		9 Dokumen	100.000.000		9 Dokumen	500.000.000
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas		4 Dokumen	100.000.000		4 Dokumen	500.000.000
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	Kab. Mjk	649	200.000.000	DAU	670	900.000.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Layanan Elektronik yang Diamankan	Kab. Mjk	85%	200.000.000	DAU	90%	900.000.000
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		4 Laporan	50.000.000		4 Laporan	400.000.000
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian		2 Dokumen	150.000.000		2 Dokumen	500.000.000
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Kab. Mjk	2,8	275.000.000	DAU	2,85	1.000.000.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Kab. Mjk	100%	275.000.000	DAU	100%	1.000.000.000
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%			100%	
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah		100%			100%	
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai Standar Data Statistik Nasional (SDSN)		86,00%			88,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.20.02.2 .01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik		52,17%	150.000.000		55,00%	300.000.000
2.20.02.2 .01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk					17,00%	150.000.000
2.20.02.2 .01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.		100%	75.000.000		100%	200.000.000
2.20.02.2 .01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik					50 Orang	100.000.000
2.20.02.2 .01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral					55,00%	100.000.000
2.20.02.2 .01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah		1 Laporan	50.000.000		1 Laporan	150.000.000
					18.829.418.492			31.085.064.371



4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026

Program dan kegiatan di tahun 2026 disusun dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029. Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 5 program, 9 kegiatan dan 28 sub kegiatan yang terdiri dari 13 sub kegiatan rutin (program penunjang urusan pemerintahan daerah) dan 15 sub kegiatan pembangunan.

Anggaran yang diusulkan pada Rencana Kerja TA.2026 yaitu Rp. 18.829.418.492,- meliputi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD 2025 sebesar Rp. 14.352.936.900,- , PAD sebesar Rp. 2.283.291.828,- , DBH sebesar Rp. 622.189.764,- dan PTAD sebesar Rp. 1.571.000.000,- sesuai usulan Program Kegiatan Tahun 2026 pada aplikasi SIPD sebagaimana tercantum pada matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi perangkat daerah pelaksana program, RKPD Tahun 2026 yang ditindak lanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya wajib memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026, maka pelaksanaan program pembangunan harus benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar perangkat daerah maupun perangkat daerah dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi

kegiatan yang telah diprogramkan maka dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Adapun rencana kerja dan pendanaan disajikan dalam matrik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 hasil *printout* SIPD sebagaimana terlampir.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MOJOKERTO
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						18.829.418.492,00							30.410.570.880,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18.829.418.492,00							30.410.570.880,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						18.354.418.492,00							28.600.570.880,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-			86,1 Nilai 96,4 Persentase	5.660.616.900,00						-	7.400.570.880,00	
		[Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel]	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	25 86.5 86.50 96.8	19 84.24 85.20 96.3	20 85 86 96.3	21 85 86.1 96.4	5.660.616.900,00	-	-	-	-	-	-	7.400.570.880,00	-
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	-			100 Persentase	12.000.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	-			100 Persentase	5.057.382.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	5.209.070.880,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	5.057.382.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		5.209.070.880,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	-			100 Persentase	0,00			-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	337.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				85 Orang	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		277.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 Persentase	96.600.000,00			-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	930.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	17.600.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	-			100 Persentase	0,00			-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan	-			100 Persentase	142.000.000,00			-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	192.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	42.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		42.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	-			100 Persentase	352.634.900,00			-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	542.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	85.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	246.034.900,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	21.600.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		42.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-			81 Persentase	4.645.814.952,00						-	5.175.000.000,00	
		[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	85	79.53	81	82	4.645.814.952,00	-	-	-	-	-	-	5.175.000.000,00	-
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	-			100 Persentase	4.645.814.952,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	5.175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				12 Laporan	2.700.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		3.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				36 Komunitas	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				20 Permohonan	489.085.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah</i>				70 Rekomendasi	384.540.188,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>				8 Media	1.072.189.764,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<i>Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Digital</i>	-			2,00 Nilai	8.047.986.640,00						-	16.025.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	Tingkat Kematangan Teknologi Digital	2.40	0	0	2	8.047.986.640,00	-	-	-	-	-	-	16.025.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten yang Telah Ditetapkan	-			100 Persentase	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				2 Dokumen	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-			26 Persentase	8.047.986.640,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	15.950.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				8 Dokumen	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				46 Perangkat Daerah	6.747.986.640,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		13.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				20 Aplikasi	900.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		1.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				3 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				9 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						275.000.000,00							1.010.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-			2,8 Nilai	275.000.000,00						-	1.010.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)]	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3	2.61	2.8	2.85	275.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.010.000.000,00	-
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai Standar Data Statistik Nasional (SDSN)	-			100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 86 Persentase	275.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	1.010.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				52,17 %	150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				15,21 %	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				100 %	75.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				50 Orang	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				52,17 %	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H							18.829.418.492,00						30.410.570.880,00		



5.1. Catatan penting

1. Perlunya mendukung upaya menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan *Smart City* di Kabupaten Mojokerto dengan membentuk suatu sistem yang terintegrasi.
2. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengetahuan dalam mewujudkan Satu Data Palapa di Kabupaten Mojokerto dengan membuat basis data yang terpadu yang akan dipakai dalam mendukung perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Mojokerto.
3. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam implelementasi keterbukaan informasi publik.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika ini memuat antara lain :

1. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika yang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dengan memperhatikan peran maupun tugas pokok dan fungsi.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan melalui Musrenbang.
4. Peranan masyarakat dan perkembangan teknologi digital dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan.
5. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yang telah disusun ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2026. Selain itu, rencana kerja tahun 2026 juga akan dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan laporan atas kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2026 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan pada tahun 2026 akan ada landasan dan arah yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menyelenggarakan program pemerintah dan memberikan pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. Nugraha Budhi Sulistya, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690915 198903 1 003